

III.2.2.1 Pemilihan Umum Majelis Rendah bulan September tahun 2005 .....	36
III.2.3 Komposisi Kekuatan Partai-Partai Politik Jepang dalam Majelis Tinggi .....	37
III.2.3.1 Pemilihan Umum Majelis Tinggi bulan Juli tahun 2001 .....	38
III.2.3.2 Pemilihan Umum Majelis Tinggi bulan Juli tahun 2004 .....	40
III.2.3.2 Pemilihan Umum Majelis Tinggi bulan Juli tahun 2007 .....	41

### **BAB III PENGARUH OPINI RAKYAT TERHADAP PERSEBARAN KEKUATAN PARTAI POLITIK DI PARLEMEN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENGIRIMAN PASUKAN BELA DIRI JEPANG KE AFGHANISTAN**

III.1 Kebijakan Pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang ke Afghanistan Tahun 2001-2002 .....	44
III.1.1 Kaitan antara Pengesahan Suatu Kebijakan dengan Kekuatan yang Mendominasi Pemerintahan dan Parlemen .....	46
III.1.2 Kaitan antara Opini Masyarakat terhadap Suatu Kebijakan terhadap Kekuatan Partai Politik .....	47
III.2 Kebijakan Pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang ke Afghanistan Tahun 2003-2005 .....	48
III.3 Kebijakan Pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang ke Afghanistan tahun 2006 – September 2007 (Masa Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe) .....	49
III.4 Kebijakan Pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang ke Afghanistan September 2007 – September 2008 (Masa Pemerintahan Perdana Menteri Yasuo Fukuda) .....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>64</b>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Penghentian Pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang dalam Operasi Pemberantasan Terorisme di Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Yasuo Fukuda”. Dimulai dengan terjadinya peristiwa terorisme yang dialami Amerika Serikat. Pasca peristiwa tersebut, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap terorisme dan menyatakan Afghanistan sebagai negara sarang teroris. Amerika mendesak Jepang untuk berperan aktif dalam operasi pemberantasan terorisme di Afghanistan. Jepang mengeluarkan Undang-undang Khusus Antiterorisme yang menjadi dasar bagi

pengiriman pasukan bela diri Jepang ke Afghanistan. Pengiriman ini menimbulkan pro dan kontra dari dalam negeri Jepang. Pengiriman pasukan bela diri terus dapat dilakukan dari masa pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi hingga masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe namun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Yasuo Fukuda pengiriman pasukan ini dihentikan.

Dalam bagian landasan pemikiran, dipaparkan satu teori dan beberapa konsep yang mendukung penjelasan mengapa sampai terjadi perbedaan kebijakan mengenai pengiriman pasukan bela diri Jepang dalam upaya pemberantasan terorisme di Afghanistan, yaitu terdiri dari teori kebijakan luar negeri, Pembuatan kebijakan luar negeri. Dengan pemaparan teori dan konsep tersebut, diharapkan bisa secara komprehensif dan tepat sasaran dalam menjelaskan mengapa terjadi sampai terjadi penghentian pengiriman pasukan bela diri Jepang dalam operasi pemberantasan terorisme di Afghanistan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Yasuo Fukuda.

Penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian bahwa terjadinya penghentian pengiriman tersebut dikarenakan opini masyarakat yang kecewa terhadap kinerja pemerintahan PM Shinzo Abe dan pada gilirannya mengalihkan suara mereka ke partai oposisi pemerintah pada pemilu Majelis Tinggi. Ketika Majelis Tinggi dikuasai partai oposisi pemerintah yaitu DPJ maka kebijakan pemerintah yang berbeda prinsip akan dihadang, seperti pengiriman pasukan bela diri Jepang ke Afghanistan.

Kata Kunci: pengiriman pasukan, opini masyarakat, kekuatan partai politik, Majelis Tinggi, Majelis Rendah

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal xiv.
- Lubis, M. 1981 *Kekuatan Yang Membisu Kepribadian dan Peranan Jepang*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Mas'oed, M, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta